

Executive Summary

SEMINAR
MENGELOLA POTENSI KELAUTAN DEMI MASA DEPAN:
Menyongsong World Ocean Conference (WOC)
Kerjasama
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)
dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Manado, 12 - 13 Maret 2009

I. Dasar Pemikiran

Laut memiliki berbagai fungsi. Sampai saat ini transportasi laut masih dominan dalam pengiriman barang antarpulau, antarnegara dan bahkan antarbenua. Pada tingkatan yang lebih rendah, transportasi laut yang mengangkut manusia juga masih menjadi pilihan, baik untuk transportasi keseharian maupun untuk wisata laut. Laut mengandung kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Beragam flora dan fauna laut bukan saja indah untuk dipandang dan menjadi obyek wisata laut yang menawan, tetapi juga dapat menjadi makanan yang berprotein tinggi serta dapat menjadi bahan bagi produk kosmetik dan bahkan bahan baku *food supplement*. Di dasar laut pula terkandung gas alam dan minyak bumi.

Selain itu, laut terkait erat dengan pertahanan dan keamanan negara. Di masa lalu dikenal pepatah, “siapa yang menguasai laut, dialah yang akan menguasai dunia.” Tak heran jika orang Inggris dahulu amat bangga pada slogan: “*Britain rules the waves.*”

Laut juga penuh dengan misteri kehidupan yang masih terus menjadi kajian menarik para peneliti. Belum lama ini para ilmuwan internasional dari berbagai disiplin ilmu juga berkumpul di Sulawesi memperingati 150 tahun ekspedisi Wallacea. Mereka bukan saja mendiskusikan berbagai temuan terkait flora fauna di wilayah Indonesia Timur melainkan juga membicarakan berbagai kerjasama penelitian laut di masa depan.

Pada tingkatan global, orang masih pula membicarakan apa yang dapat disumbangkan oleh laut dalam mengurangi pemanasan global. Namun yang pasti, jika pemanasan global semakin buruk dan air laut semakin naik ke daratan, negara-negara kepulauan seperti Indonesia, Maladewa, negara-negara di gugusan Melanesia, Polynesia dan Micronesia di Pasifik Selatan akan terkena dampak negatifnya, bahkan mungkin akan ada pulau-pulau kecilnya yang tenggelam.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sekitar 17.000 pulau-pulau besar dan kecil, baik yang sudah bernama maupun yang tanpa nama. Dihitung dari panjang garis pantai, Indonesia adalah negara terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, dengan total panjang garis pantai mencapai sekitar 81 ribu kilometer. Kawasan laut mencakup 70% dari keseluruhan wilayah Indonesia dan hanya 30% saja yang berupa daratan. Indonesia juga merupakan negara di Asia Tenggara yang paling banyak memiliki pulau-pulau terluar (atau terdepan), sekitar 92 pulau, yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, dari Barat sampai ke Timur, yaitu: India, Burma, Malaysia, Singapura, Vietnam, RRC, Thailand, Filipina,

Timor Leste, Australia, PNG, dan gugusan kepulauan Micronesia. Dari ke-92 pulau terdepan itu, paling tidak ada 12 pulau terdepan yang konon mendapatkan prioritas perhatian utama dari pemerintah Indonesia karena letaknya yang lebih dekat ke negara tetangga ketimbang ke ibukota provinsi terdekat di wilayah Indonesia, yakni, Pulau Rondo, Pulau Sekatung, Pulau Nipa, Pulau Berhala, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Dana, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Bras dan Pulau Batek. Selain itu, karena letak Indonesia yang berada di persimpangan jalan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta antara benua Asia dan benua Australia, paling tidak ada tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) utama dari Utara ke Selatan dan sebaliknya dan dua ALKI tambahan sebagai pecahan dari ALKI Utama Timor yang dipecah menjadi tiga ALKI kecil. Dengan demikian, ada lima ALKI yang memungkinkan kapal-kapal asing berlayar melalui kepulauan nusantara atas prinsip *Innocent passage* (pelayaran damai).

Dari gambaran di atas tampak jelas bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Upaya Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan internasional sebagai negara kepulauan/maritim sudah berlangsung lama, ketika Kabinet Djuanda pada 1957 berupaya untuk memperjuangkan apa yang kemudian dikenal sebagai Wawasan Nusantara, suatu cara pandang melihat Indonesia bukan saja sebagai wilayah daratan semata melainkan juga wilayah lautnya. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan itu pun kemudian diakui secara internasional di dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982. Pengakuan ini penting agar wilayah nusantara dapat dijaga keamanan maritimnya secara baik.

Bila kita menengok kembali sejarah masa lampau, kerajaan-kerajaan di kepulauan nusantara di masa lalu---seperti Kerajaan Peureulak, Samudra Pasai, Sriwijaya, Majapahit, Syailendra, Kesultanan Bacan, Ternate, Tidore--- telah banyak melakukan perdagangan internasional dengan negara-negara sekawasan Asia Tenggara, sampai ke Timur Tengah, Asia Selatan dan juga Asia Timur, jauh sebelum kaum penjajah dari Eropa Barat datang ke Asia. Ini berarti di masa lalu pun nenek moyang kita telah memancarkan tonggak-tonggak sejarah Indonesia sebagai bangsa maritim. Para pedagang dari berbagai belahan dunia datang ke nusantara untuk membeli rempah-rempah, emas, pasir besi, damar, rotan, kayu besi, kayu cendana, dan sebagainya.

Namun, meski Indonesia adalah negara maritim yang menyimpan kekayaan laut yang tak terhingga nilainya, wilayah laut nusantara tampaknya belum mendapatkan perhatian yang selayaknya dari pemerintah. Misalnya, pertahanan maritim kita yang masih kurang memadai. Sistem keamanan laut kita juga masih belum mampu menihilkan pencurian ikan, penyelundupan kayu, pasir besi, pasir laut, batu kapur, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan sebagainya yang dilakukan oleh orang asing atau orang Indonesia, termasuk para pejabatnya, yang berkolaborasi dengan orang asing.

Selain itu, pembangunan pulau-pulau terluar/terdepan sangat memprihatinkan. Pulau-pulau itu bukan hanya jendela untuk menatap ke luar Indonesia melainkan juga pintu masuk ke wilayah nusantara. Kita melihat betapa memilikannya nasib saudara-saudara kita yang menghuni pulau-pulau terluar Indonesia. Apa pula peran Indonesia dalam menata laut agar memiliki sumbangsih bagi pengurangan pemanasan global.

Menjelang diselenggarakannya *World Ocean Conference* (WOC) di Manado pada April 2009, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) akan menyelenggarakan seminar sehari bertema “**Mengelola**

Potensi Kelautan Demi Masa Depan: Menyongsong *World Ocean Conference (WOC)*. Seminar diselenggarakan pada: 12-13 Maret 2009 bertempat di Swiss-Belhotel Maleosan Manado, Sulawesi Utara.

II. Tujuan Seminar

1. Memberikan masukan pemikiran dan rekomendasi kebijakan terkait dengan pengelolaan dan pengembangan potensi kelautan.
2. Terkelolanya potensi kelautan Indonesia untuk kesejahteraan rakyat.
3. Terbentuknya jaringan kerjasama internasional di bidang kelautan.
4. Terbentuknya pusat studi kelautan internasional.

III. Topik dan Pembicara Seminar

<p>Keynote Speech</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prof. Ir. Widi Agoes Pratikto, M.Sc, Ph.D (Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia)2. Dra. Masnellyarti Hilman, M.Sc (Deputi Bid. Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pengendalian Kerusakan, Kementerian Lingkungan Hidup)
<p>Topik 1 : Masalah Pengelolaan Pembangunan Berbasis Kelautan Pembicara:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prof. Dr. Martani Huseini2. Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA3. Prof. Dr. Indroyono Soesilo, APU4. Dr. Arif Satria <p>Moderator : Stefanus Sampe, S.Sos., MPubPol</p>
<p>Topik 2: Ekosistem Kelautan dan Pemanasan Global Pembicara:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prof. Dr.rer.nat. Ir. Abraham S Khouw, MPhil2. Prof. Dr. Wahyoe Soepri Hantoro <p>Moderator : Dra. Trielke Tulung</p>
<p>Topik 3: Wawasan Nusantara, Hukum Laut Internasional dan Masalah Keamanan Maritim Pembicara:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dr. Makmur Keliat2. Laksma (Purn) F.X. Eddy Santoso, S. IP3. Drs. Syamsumar Dam, APU <p>Moderator : Dr. Ninok Leksono</p>
<p>Topik 4 : Ekonomi Maritim Negara Kepulauan Pembicara:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prof. Dr. A.B Lopian & Prof. Dr. Joyce Lopian, M.Ec2. Dr. Aviliani <p>Moderator : Dra. Fee Sondak M</p>

IV. Peserta Seminar

Seminar ini diikuti oleh para ahli bidang kelautan, lingkungan, pertahanan, keamanan, pemerintahan, politik, hubungan internasional, dan administrasi negara yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, para praktisi politik di pemerintahan, anggota legislatif, akademisi, AIPI, serta para peminat lain yang mendaftarkan diri ke panitia seminar.

V. Pelaksanaan Seminar

Pembukaan seminar ini diadakan pada hari Kamis, 12 Maret pukul 19.00 WITA bertempat di Ruang Seminar Swissbell Hotel, Manado. Seminar ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara yang sekaligus merupakan Ketua Umum PP AIPI; Drs. S.H. Sarundajang. Dalam acara pembukaan ini juga meluncurkan buku “Sarundajang dan WOC” yang disusun oleh Michael F. Umbas. Selanjutnya, secara umum pelaksanaan seminar pada hari Jumat, 13 Maret 2009 berlangsung dengan sukses dan terselenggara dengan baik. Sebanyak kurang lebih 200 peserta hadir dalam acara seminar ini.

VI. Substansi Pelaksanaan Seminar

1. Materi Pertama : Masalah Pengelolaan Pembangunan Berbasis Kelautan. Para pembicara dalam materi ini antara lain Prof. Dr. Martani Huseini; Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA; Prof. Dr. Indroyono Soesilo, APU; dan Dr. Arif Satria. Berikut intisari substansi materi dari masing-masing pembicara.
 - a. Prof. Dr. Martani Huseini
 - ◆ Bahwa pada tahun 2005 sebenarnya sudah diputuskan oleh pemerintah bahwa tiga komoditas andalan kita: tuna, udang dan rumput laut. Itu merupakan basis pengelolaan sektor perikanan Indonesia. Sebagai catatan, sektor kelautan Indonesia sebenarnya dapat menghasilkan sekitar 30 trilyun dari ekspor kita, kalau kita rupiahkan kira-kira bisa menghasilkan 30 trilyun. Tetapi kita juga kehilangan 30 trilyun karena *illegal fishing*.
 - ◆ Karena ulah beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti penangkapan ikan yang tidak sesuai standar penangkapan, penggunaan bahan peledak menyebabkan sektor pembangunan kelautan, khususnya untuk perikanan menjadi semakin lemah. Oleh karena itu, perlu segera dibuat perda dan aturan khusus yang lebih tegas untuk mengatur sektor ini.
 - ◆ Isu strategis mengenai perikanan yang pertama adalah masalah-masalah *bargaining power*. Semestinya Indonesia tidak lagi didikte oleh konsumen, karena kita adalah pemilik sumber daya. Namun disisi lain kita juga harus mengikuti aturan internasional mengenai import produk perikanan. Kedua, masalah *sustainability*, dan masalah politik, masalah *safety*. Dan ketiga adalah masalah domestik. Ketiga masalah inilah yang harus dicermati dengan baik.

- ◆ Selain itu, perlu penataan ulang bahan baku dan *logistic system*, *food safety & quality* dimana harus mengikuti aturan dunia, nilai tambah diciptakan, sarana perikanan juga harus diciptakan, kemudian pertanggungjawaban kelembagaan dan pemasaran.
 - ◆ Beberapa isu lain yang juga perlu diperhatikan. Pertama adalah masih beberapa *gap*, *gap* pemikiran, *gap* visi. Kedua masalah pasokan, kontinyu atau tidak. Yang ketiga adalah masalah mutu atau kualitas.
- b. Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA
- ◆ Pilar pembangunan meliputi tiga aspek: aspek/dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan. Di sektor perikanan dan kelautan itu paling tidak ada empat atau lima industri. Yang pertama industri mineral dan energi, ini kalau kita lihat perolehan PDB (Produk Domestik Bruto) itu mendominasi, kurang lebih 35 sampai 30 sekian persen. Kemudian industri maritim yang menempati urutan yang cukup potensial. Kemudian ada industri pelayaran. Kemudian ada industri pariwisata. Industri pariwisata memiliki kelebihan karena ia memiliki income 3,1, artinya kalau dikembangkan untuk investasi ini sangat cocok untuk daerah-daerah yang memiliki potensi wisata.
 - ◆ Industri perikanan memiliki daya serap tenaga kerja yang cukup tinggi. Ini salah satu yang memiliki keunggulan dari sekian industri-industri kelautan. Yang menjadi kesulitan sebenarnya bahwa bagaimana menterjemahkan kebijakan-kebijakan di tingkat nasional itu diimplementasikan di tingkat daerah.
 - ◆ Prospek pembangunan kelautan dan perikanan ini sebenarnya masih sangat besar. Yang menjadi tantangan sebenarnya tekno struktur dan komitmen pemerintah, termasuk komitmen pemerintah daerah. Yang kedua perlu mulai berpikir terutama sektor-sektor yang sifatnya ekstratif, mulai mempertimbangkan sistem-sistem pengelolaan yang berkelanjutan dengan memelihara beberapa daerah-daerah konservasi. Dan ketiga, perlu dipersiapkan perencanaan-perencanaan mitigasi dan adaptasi.
- c. Prof. Dr. Indroyono Soesilo, APU
- ◆ Deklarasi Djoenda dan pengakuan *United Nations Convention of Law of the Seas* pada tahun 1982 memperlihatkan bahwa luas laut Indonesia bertambah sehingga total luasnya adalah 5,8 juta km persegi. Luas daratnya 1,9 juta km persegi. Diplomasi Indonesia dalam konteks ini dinilai sebagai diplomasi yang berhasil tanpa harus melibatkan kontak senjata.
 - ◆ Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat maupun pemerintah harus memanfaatkan dan melestarikan potensi sumber daya kelautan dan harus menjadi negara kelautan yang disegani dunia. Menurut pembicara, strategi inilah yang dipakai dan strategi ini yang akan dijual. Dan apabila hal ini digarap, maka Indonesia dapat menjadi negara kelautan yang disegani oleh dunia.

- ◆ Salah satu upaya tersebut ditunjukkan pada tahun 2005 ketika menteri-menteri kelautan APEC, berkumpul di Bali dan menghasilkan kebijakan kelautan Asia Pacific dan sekarang menjadi pedoman untuk wilayah Asia Pacific, salah satunya adalah upaya 10 negara regional melawan *illegal fishing*.
- ◆ Masalah pembangunan kelautan juga terkait dengan observasi bumi dan pemantau laut. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam konsep pembangunan berbasis kelautan juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, jangan hanya isu lingkungan darat yang menjadi prioritas utama. Apalagi ironisnya di Indonesia, isu laut tidak pernah dimasukkan ke dalam isu dunia.
- ◆ Dengan demikian, ketika Indonesia menggagas *World Ocean Conference 2009 & Coral Triangle Initiative Summit*, itu merupakan langkah yang sangat baik.
- ◆ Output yang diharapkan dalam WOC tersebut adalah *Manado Ocean Declaration (MOD)*, yang dituangkan dalam empat isu. 1) dampak laut terhadap perubahan iklim, 2) peran laut terhadap perubahan iklim, 3) adaptasi, mitigasi terhadap perubahan iklim di laut, dan 4) kerjasama internasional.

d. Dr. Arif Satria

- ◆ Untuk memulai pembangunan berbasis kelautan, maka dalam rangka untuk mereventing Indonesia, perlu menempa kembali Indonesia dengan kelautan. Sehingga dengan kelautan ini bisa menciptakan ketahanan nasional dan kedaulatan bangsa.
- ◆ Penempatan tersebut menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi, fiskal moneter, keuangan, perbankan, dan tata ruang dalam kebijakan lingkungan, dalam kebijakan pertahanan, dalam kebijakan kesejahteraan sosial, termasuk penanggulangan kemiskinan di dalamnya. Kemudian kebijakan sumber daya manusia dan kebijakan hukum yang meliputi penegakan hukum.
- ◆ Namun disisi lain, Indonesia justru masih tergantung pada konsep dan belum ada *road map* untuk bagaimana mengembangkan energi laut. Jadi pengetahuan saja masih sangat kurang. Kesadaran kolektif atau bahkan kesadaran politik belum ada. Dan belum menganggap isu kelautan dan perikanan sebagai isu sebuah bangsa. Kelautan dan perikanan hanya dianggap kepentingan nelayan, yang jumlahnya hanya 4 juta orang.
- ◆ Dari kesadaran politik, kesadaran itupun beragam, kesadaran laut secara geografis. Secara umum orang Indonesia sadar secara geografis. Tetapi belum sadar secara sosial dan budaya, bagaimana identitas masyarakat sebagai identitas masyarakat bahari. Kemudian kesadaran geopolitik, bagaimana posisi geopolitik kita itu sangat menentukan sekali. Kemudian kesadaran ekologis, bagaimana laut memiliki fungsi-fungsi ekologis, seperti meredam global warming dan lain sebagainya.
- ◆ Namun setidaknya ada beberapa langkah penting yang dapat dilakukan untuk mendukung pembangunan berbasis kelautan ini.

Dalam aspek struktural misalnya, yang bisa dilakukan adalah mempengaruhi bahwa laut sebagai kepentingan publik, sebagai kepentingan bangsa, serta munculnya keputusan-keputusan politik yang berpihak pada kelautan dan perikanan.

- ◆ Misalnya fungsi kementerian dan kelautan sebagai duta sebagai ambassador untuk sektor kelautan dan perikanan. Yang fungsinya memperjuangkan kepentingan kelautan dan perikanan dalam bidang apapun, dalam proses meanstreaming. Ketika ada policy soal tata ruang, menteri harus bicara mengenai pentingnya sektor kelautan dan perikanan terhadap tata ruang.

2. Materi Kedua : Ekosistem Kelautan dan Pemanasan Global. Para pembicara dalam materi ini adalah Prof. Dr.rer.nat. Ir. Abraham S Khouw, Mphil dan Prof. Dr. Wahyoe Soepri Hantoro. Berikut intisari substansi materi dari masing-masing pembicara.

a. Prof. Dr. Rer.nat. Ir. Abraham S. Khouw, M.Phil

- ◆ Poin utama yang ditekankan oleh pembicara adalah masalah *global warming*. *Global warming* itu sendiri terjadi itu karena ulah manusia sendiri. Dampak dari *global warming* ini sungguh luar biasa.
- ◆ Istilah *global warming* atau pemanasan global itu lebih banyak diakibatkan sebagai *greenhouse effect* atau efek rumah kaca. Proses terjadinya *global warming* itu sendiri itu bahwa ketika sinyal matahari yang memasuki bumi itu nanti sebagian akan dipantulkan kembali. Dan waktu dia memantulkan kembali ke atmosfer kita ini akan terdapat begitu banyak gas-gas yang pada prinsipnya dia akan menutupi seluruh permukaan bumi ini sehingga waktu panas yang diterima bumi ini akan dipantulkan kembali dia akan terperangkap akibat dari zat-zat yang ada di atmosfer kita. Hal inilah yang akan mengakibatkan terjadinya proses terjadinya kenaikan temperatur di permukaan bumi.
- ◆ Dampak dari pemanasan global itu sendiri sekarang bahwa terjadinya perubahan iklim global atau ada beberapa tempat yang dulunya itu normal-normal saja, secara khusus juga Indonesia, itu di beberapa tempat sekarang justru akan terjadi kemarau yang berkepanjangan dan di beberapa tempat itu akan terjadi curah hujan yang sangat tinggi
- ◆ Selain itu, akibat dari pemanasan global ini maka es atau gletser yang ada di kutub utara akan mengalami proses pencairan yang sangat cepat. Beberapa catatan yang bisa kita temui lewat media ditemukan bahwa ternyata ada pulau-pulau *Gletser* yang berada di Antartika itu sudah mulai mengalami percepatan di dalam pergerakannya hal ini disebabkan karena terjadi proses pencairan pada sisi bagian bawah daripada pulau-pulau es itu.
- ◆ Dampak lainnya dari pemanasan global terhadap laut adalah karena terjadinya perubahan iklim ini secara global maka spesies-spesies

laut yang berpindah ini juga akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi pada habitatnya yang baru. Ini sebenarnya dampak yang paling terasa daripada pemanasan global terhadap ekosistem laut. Yang berikut, ini sebenarnya secara global itu bisa kita lihat bahwa akibat dari pemanasan global terjadinya frekuensi badai berkategori empat sampai lima itu hampir dua kali dalam 30 tahun terakhir. Yang berikutnya, malaria yang biasanya terjadi di daerah-daerah rendah itu justru menyebar pada lintang yang tinggi.

- ◆ Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menghadapi pemanasan global maksimal hanya bisa untuk mengeliminasi dampak daripada *global warming* itu sendiri. Yang pertama harus mengurangi emisi gas-gas penyebab *greenhouse effect* atau efek dari rumah kaca. Yang kedua yaitu kita harus menata lingkungan kita, secara khusus ini sebenarnya dampak yang terbesar yang diperoleh laut itu sebenarnya dari darat. Sebagai contoh misalnya kalau di darat itu kita tidak tata dengan baik, kita buka lahan atau tidak dilakukannya reboisasi, maka kemungkinan besar akan terjadi proses sedimentasi dan ini sangat-sangat menyebabkan dampak yang luar biasa pada ekosistem laut.

b. Prof. Dr. Wahyoe Seopri Hnatoro

- ◆ Berbicara mengenai pemanasan global atau perubahan global, maka sumbernya adalah manusia dengan gas yang dihasilkan, CO₂, nitrogen dan sebagainya. Dan satu lagi yang jarang diperhitungkan yaitu *albedo*. Jadi atap-atap dari gedung yang berkilau itu, mulai dari seng dan sebagainya, pabrik dan sebagainya yang dilihat dari sengnya itu begitu cemerlang atau silau, ini akan memantulkan energi matahari.
- ◆ Jika dibandingkan di Indonesia ada daerah-daerah tertentu yang kecenderungannya relatif naik, ada yang relatif turun dan sebagainya. Ini berkaitan ukuran gaya beratnya karena ada kaitannya dengan aspek biologis.
- ◆ Kalau peta itu dibuat skenario 5 mm kenaikan muka air laut global maka akan mengalami kecepatan kenaikannya kurang lebih 3 mm. Pemanasan global akan mengalami sedikit kenaikan tetapi suatu ketika dia akan turun. Persoalannya apakah kenaikan ini sampai 2 meter atau mungkin 10 meter. Beberapa skenario pesimistik mengatakan kalau Greenland itu meleleh, sampai 5 meter. Dan kejadian tsunami seperti ini juga harus diperhitungkan, ketika air laut sudah hampir 1 meter lebih tinggi, tsunami tentu saja akan menusuk lebih dalam lagi ke daratan.
- ◆ Sebagai contoh di kawasan Jakarta. Wilayah Jakarta terkena isu kenaikan muka air laut. Ini memang menjadi semakin rentan, karena daratannya sendiri mengalami penurunan. Seperti di daerah Daan Mogot, suatu ketika akan seringkali mengalami banjir karena faktor tersebut.
- ◆ Jadi ketika suatu daerah itu dulunya sebuah pulau bisa jadi suatu ketika nantinya akan menjadi kawasan yang tenggelam dan akan

menjadi laut dan sebagainya. Untuk Jakarta dia akan mengalami penurunan dan dia akan cepat sekali mengalami ketenggelaman.

- ◆ Dari sisi kelautan, perlu menghitung potensi terumbu karang ketika mengaksort CAO3, 4,8 juta ton dan 40% ini adalah CO2. Buktinya adalah ketika dibandingkan ukuran CO2 dengan yang di kawasan yang namanya kotabang, berarti dengan kata lain oleh hujan suhu di atmosfer ini ditangkap kemudian turun ke laut, ditangkap oleh terumbu-terumbu karang ini. Inilah yang seharusnya kita perjuangkan mengingat Indonesia memiliki terumbu karang yang luas sekali. Jadi CTI nanti diharapkan bisa mengakomodir potensi ini.

3. Materi Ketiga : Wawasan Nusantara, Hukum Laut Internasional dan Masalah Keamanan Maritim. Para pembicara dalam materi ini yaitu Dr. Makmur Keliat; Laksma (Purn) F.X. Eddy Santoso, S. IP; dan Drs. Syamsumar Dam, APU. Berikut intisari substansi materi dari masing-masing pembicara.

a. Dr. Makmur Keliat

- ◆ Pokok pembahasan pertama dalam pemaparan pembicara adalah keamanan maritim secara konseptual. Dan yang kedua bagaimana konsep keamanan maritim ini membawa kebijakan bagi Indonesia di masa depan. Asumsi pemakalah adalah konsep keamanan maritim sudah dikembangkan di tingkat internasional maupun regional. Dengan demikian, struktur pembahasan makalahnya terbagi dalam empat bagian. Pertama tentang konseptual keamanan itu sendiri. Yang kedua mencoba mengidentifikasi konsep keamanan maritim pada tataran internasional dengan merujuk pada diskusi-diskusi yang dilakukan pada tataran PBB. Dan yang ketiga konsep keamanan maritim pada tataran regional, khususnya pada konteks ASEAN. Dan yang terakhir adalah dampak kebijakannya bagi Indonesia.
- ◆ Dalam studi keamanan ada dua mazhab utama, yaitu mazhab tradisional dan mazhab non tradisional. Dalam mazhab tradisional fokusnya pada konflik antar negara, kemudian konfrontasi militer. Mazhab non tradisional biasanya berfokus pada tidak semata-mata pada inter state tetapi juga pada intra state, dan juga pada transnasional isu.
- ◆ Mazhab non tradisional, objeknya tidak hanya pada negara tetapi sangat luas, bisa menyangkut lingkungan hidup, pangan. Oleh karena itu dikenal istilah-istilah seperti keamanan pangan, keamanan lingkungan hidup, dan sebagainya. Security landscapenya sangat luas, tidak hanya dalam konteks kompetisi antara negara tetapi juga transnasional, trans boundary atau intra state. Karena itu cenderung mazhab non tradisional itu melakukan sekuritisasi.
- ◆ Dari data-data yang diperoleh, sebenarnya tidak ada definisi khusus konsep keamanan maritim. Di dalam debat-debat internasional tidak ada definisi apa yang disebut dengan keamanan maritim.

- ◆ Namun demikian, ada komponen yang tercakup dalam keamanan maritim, yaitu tingkatan teroris terhadap pelayaran kapal dan instalasi lepas pantai, pembajakan dan perampokan bersenjata, lalu lintas obat terlarang dan narkoba.
- ◆ Komponen cakupannya juga lebih luas. Ada lingkungan kelautan atau *marine security* dan *illegal fishing*.
- ◆ Mekanisme untuk membicarakan keamanan maritim di tingkat regional itu melalui *ASEAN Maritime Forum*. *ASEAN Maritime Forum* yang sebenarnya bagian dari komponen *ASEAN Security Community* dan juga melalui ASEAN regional forum.
- ◆ Perlu diperhatikan bahwa karakteristik laut di Asia Tenggara, kerjasama kelautan merupakan sesuatu yang wajar, karena kalau kita lihat peta di laut Asia Tenggara itu dikategorikan sebagai *semi enkosi* artinya semi tertutup. Oleh karena itu, parameternya biasanya 90% terdiri dari daratan. Karena 90% terdiri dari daratan, harus terdapat kerjasama untuk menentukan batas-batas kelautan itu.
- ◆ Dalam kasus di Indonesia itu, seperti penyelesaian masalah pulau Sipadan. Biasanya kalau menyangkut *boundary making*, dan *ownership* dia harus lewat pola bilateral. Tetapi untuk pola regional itu biasanya sifatnya adalah *consultative arrangement*, biasanya itu untuk pengembangan laut dan juga untuk manajemen.
- ◆ Menurut pembicara, trans boundary itu, tanpa *boundary* sebenarnya berarti kerjasama menentang boundary. Jadi trans boundary tanpa national boundary, menjadi *cooperation against boundary*. Kemudian dia mengakibatkan internalisasi itu, karena itu prioritasnya pada batas kelautan, yaitu menentukan luas geografis negara kepulauan.
- ◆ Selain itu, upaya berikutnya yang menyangkut keamanan maritim Indonesia adalah memperkuat klaim terhadap pulau-pulau terluar. Sebenarnya, tidak ada yang disebut dengan pulau terluar, semuanya adalah pulau. Pulau-pulau kecil yang paling menentukan batas ini harus di klaim, tetapi tidak sekedar di klaim tetapi juga harus benar-benar menunjukkan apa yang disebut dengan *effective occupation*.
- ◆ Dari segi hukum internasional, klaim saja tidak cukup, tetapi birokrasinya harus hadir di sana. Harus ada kegiatan administrasi pemerintahannya yang disebut dengan konsep *effective occupation*.
- ◆ Juga perlu dipikirkan untuk menempatkan seluruh batas pulau-pulau kecil yang dianggap rawan dalam menentukan batas nasional ini dalam satu badan otoritas khusus.
- ◆ Secara keseluruhan, harus ada *integrated maritime security policy*. kebijakan unilateral dalam keamanan maritim. Hal itu menjadi prioritas pertama untuk menegakkan batas-batas nasional. Sedangkan kebijakan yang regional, dan yang internasional yang mana ia mendorong terjadinya kerjasama menjadi prioritas kedua.

- b. Laksma (Purn) F.X. Eddy Santoso, S.IP
- ◆ Di Indonesia sebenarnya terdapat Badan Koordinasi Keamanan Laut. Badan ini adalah koordinasi mengenai keamanan di laut, bukan pertahanan.
 - ◆ Dari sisi filosofi seharusnya pemerintah lebih atau secara otomatis melihat wawasan nusantara sebagai landasan kebijakan dalam mengelola potensi kelautan di Indonesia.
 - ◆ Dari sisi esensinya, wawasan nusantara berkaitan dengan hukum laut internasional atau yang disebutkan UNCLOS. Tentunya terkandung di dalam wilayah adalah geopolitik dan geostrategi
 - ◆ Dari sisi hukum laut internasional, terdapat empat rejim, yaitu laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, laut lepas, landas kontingen dan sebagainya. Setiap rejim tadi perlakuannya berbeda. Ada yang penuh di bawah kekuasaan negara atau kedaulatan; misalnya pengelolaan, melindungi dan menegakkan kedaulatan sendiri. Ada yang sebagian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat internasional, misalnya di ZEE (zona eksklusif ekonomi) tapi menurut aturan negara kita, yaitu ZEEI (zona eksklusif ekonomi Indonesia).
 - ◆ Sebenarnya banyak manfaat yang dapat dimiliki Indonesia dalam hal potensi kelautan. Yaitu untuk media perhubungan atau SOC (*sensing of communication*), sumberdaya alam untuk pertahanan dan keamanan.
 - ◆ Namun ada kerugiannya juga. Dengan luas wilayah yang bertambah 2 setengah kalinya, maka pengendaliannya juga makin besar, makin berat. Ada beberapa ancaman di sana, ancaman yang faktual maupun ancaman yang potensial. Yang faktual berbagai macam illegal, baik *fishing*, *logging*, *meaning*, dan sebagainya. Kemudian yang potensial adalah pelanggaran wilayah
 - ◆ Undang-undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran mensyaratkan adanya *sea post guard* Indonesia. Dalam hal ini Bakorkamla menghendaki adanya multi fungsi seperti yang TNI AL kerjakan pada waktu patroli koordinasi kapal DKP perikanan, kapal perhubungan- KPLB. Kalau dia beroperasi dalam bendera Bakorkamla dia dapat menghentikan dan memeriksa kapal apapun. Yang seharusnya kapal ikan hanya ikan, namun karena itu dibawah kendali Bakorkamla, bisa memeriksa kayu, manusia termasuk *transnasional crime*.
 - ◆ Oleh karena itu, dalam jangka panjang perlu badan yang mampu menangani berbagai tadi, ini tadi yang berkaitan dengan efisiensi.
- c. Drs. Syamsumar Dam, APU
- ◆ Pada dasarnya, filosofi hukum laut internasional terdapat konsep yang disebut dengan kedaulatan penuh. Dan kedaulatan penuh ini hanya ada di negara kepulauan seperti Indonesia.
 - ◆ Selain itu, dikenal pula ilmu yang disebut dengan Oseanografi. Politik kelautan ini adalah bagaimana memanfaatkan semua potensi kelautan untuk di dalam hubungan internasional untuk memperkuat kekuatan nasional Indonesia.

- ◆ Namun yang menjadi persoalan sampai saat ini adalah selama ini orientasi pembangunan dan keamanan masih ke darat. Untuk merubah orientasi ini diperlukan pembagunan budaya politik kelautan.
 - ◆ Oleh karena itu Indonesia harus mempersiapkan generasi ke depan yang lebih berkualitas yang berorientasi ke laut sejak dari taman kanak-kanak. Semuanya harus dilakukan secara terpadu, sehingga satu generasi kemudian kita harus punya visi tentang budaya kelautan itu tadi.
 - ◆ Orientasi mencintai laut itu tidak bisa spontanitas. Para ahli kelautan Indonesia sudah banyak, tetapi orientasi mereka masih saja tetap ke darat.
 - ◆ Kuncinya tiga pilar tadi, sumpah pemuda bahwa kita akan tetap mempertahankan satu nusa, satu bangsa, satu tanah air. Kemerdekaan yang kita peroleh dengan keinginan penyatuan antara darat dengan laut, sejak tahun 1957.
4. Materi Keempat : Ekonomi Maritim Negara Kepulauan. Para pembicara untuk materi ini adalah Prof. Dr. A.B Lopian & Prof. Dr. Joyce Lopian, M.Ec dan Dr. Aviliani. Berikut intisari substansi materi dari masing-masing pembicara.
- a. Prof. Dr. AB Lopian & Prof. Dr. Joyce Lopian
- ◆ Istilah negara kepulauan itu sebenarnya istilah yang cukup resiko, karena merupakan suatu terjemahan istilah yang begitu dikenal yaitu *archipelago state*.
 - ◆ Pada kasus ini, integrasi ekonomi sebenarnya sesuatu hal yang juga kurang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia.
 - ◆ Dari segi budidaya perairan, terlihat dampak atau kendala dengan adanya budi daya dan konversi hutan. Kemudian pertambangan, seperti pertambangan pasir yang menyebabkan terumbu karang menjadi rusak. Kemudian kehutanan, ada penebangan dan konversi hutan di situ, begitu juga dengan industri, dan reklamasi dan pengurukan tanah.
 - ◆ Hal lainnya yang perlu dilihat dalam aspek ekonomi kelautan adalah para nelayan. Pemerintah harus melihat nelayan ketika mengalami kesulitan di dalam pemenuhan kebutuhan atau penduduk yang ada di pesisir pantai
 - ◆ Kemudian potensi penduduk yang menyebar di pulau-pulau itu merupakan aset yang strategis untuk peningkatan aktifitas ekonomi antar pulau. Sekaligus merupakan pertahanan dan keamanan negara.
 - ◆ Oleh karena itu, perlu *political will* yang tinggi guna mengatasi kepastian hukum. Walaupun tadi sudah dijelaskan sebagai panduan dalam memanfaatkan sumber daya kelautan, yaitu tantangan perairan.
 - ◆ Ketika kebijakan tersebut sudah ada, maka implementasinya harus diawasi, karena ini sudah berjalan. Kemudian infrastuktur yang itu

antara lain penyediaan dermaga atau tempat pelelangan ikan dan lain sebagainya.

- ◆ Dalam jangka menengah dan panjang, harus ada koordinasi dengan pertanian dan lain sebagainya, terutama dalam rangka memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat yang berbasis ekonomi kelautan, seperti nelayan.

b. Dr. Aviliani

- ◆ Sebelum tahun 1998, manufaktur ekonomi Indonesia cukup bertumbuh baik. Ada yang namanya GBHN, setiap lima tahun ada yang mau dicapai, sehingga pada waktu itu swasembada pangan tercapai. Kemudian pertumbuhan bisa mencapai 8%, sebelum tahun 1998 sehingga angkatan kerja, kemiskinan dan pengangguran itu relatif lebih kecil.
- ◆ Namun dalam 10 tahun terakhir yang menarik adalah era otonomi daerah yang mulai dijalankan. Yang terjadi adalah pengangguran dan kemiskinan diharapkan makin turun, tetapi justru kemiskinan dan pengangguran makin naik. Hal ini terjadi karena tiga hal, pertama adalah sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, yang kita punya daya saing seharusnya, itu bertumbuh tidak lebih dari 4%, jauh dari sektor komunikasi yang tumbuh sampai dengan 20%. Yang kedua sektor pertambangan, yang seharusnya kita bisa tumbuh dengan baik, malah negatif di tahun 2008. Yang ketiga adalah manufaktur, ini yang justru padat tenaga kerja yang turun, dari 5% malah menjadi 4,8%.
- ◆ Perkembangan terakhir dari otonomi daerah adalah ketika prioritas ekonomi pemerintah daerah lebih mengarah pada perdagangan. Perdagangan, pembangunan properti, pembangunan mall ada dimana-mana, tetapi tidak terjadi suatu proses di mana kompetensi daerah yang dikaitkan dengan potensi daerahnya itu dikembangkan.
- ◆ Jika berbicara tentang ekonomi maritim, sebenarnya semua orang selalu mengunggulkan, Indonesia kaya dengan laut, pertanian dan perkebunan. Tetapi dalam pelaksanaannya justru masih belum optimal.
- ◆ Oleh karena itu basis kedepan perlu menginisiasi bagaimana ekonomi maritim perlu dikembangkan. Karena menurut pembicara, ada dua hal penting yang terkait dengan pengembangan ekonomi maritim. Pertama, pariwisatanya, karena pariwisata di Indonesia ini justru yang paling disukai adalah maritim. Kemudian yang kedua adalah hasil perikanan dan kelautan. Ini adalah potensi yang sangat besar.
- ◆ Selain itu, perlu bicara juga tentang nelayan. Kalau bicara maritim itu ada industri besar, ada industri kecil. Industri kecil atau nelayan, ini tidak pernah dipikirkan. Sehingga yang terjadi adalah ketika berbicara nelayan, tidak ada kredit yang mau kasih ke nelayan.

- ◆ Oleh karena itu peran pemerintah, pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat menjadi penting di dalam mengembangkan industri, tidak bisa itu dilepas pada mekanisme pasar

VII. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari substansi semua materi diatas, dapat disimpulkan bahwa berbicara tentang kelautan di Indonesia, perlu mencermati beberapa aspek dan saling terkait antara satu aspek dengan aspek lainnya. Aspek pertama adalah persoalan kualitas pengelolaan pembangunan kelautan Indonesia. Idealnya, Indonesia yang memiliki potensi kelautan cukup besar dapat melakukan ekspor produk kelautan ke beberapa negara dengan mudah. Namun sayangnya hal ini terhambat karena terbentur oleh masalah mutu yang tidak memenuhi standar internasional. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar berfokus pada pengelolaan pembangunan kelautan Indonesia sehingga produk yang dihasilkan sulit bersaing dengan negara-negara lainnya yang juga menghasilkan potensi laut mereka. Karena itulah seringkali kualitas potensi kelautan Indonesia dipertanyakan walaupun disisi lain dari sisi kuantitas dinilai sangat tinggi.

Masalah dalam aspek pertama ini terkait dengan lemahnya dan ketidaksadaran beberapa pihak dalam mengelola potensi kelautan di Indonesia, termasuk di dalamnya masyarakat sendiri. Beberapa kasus memperlihatkan kecerobohan oknum dalam mengelola potensi kelautan, seperti penggunaan bahan peledak, jaring yang tidak sesuai standar, perusakan terumbu karang, hingga dampak yang paling besar adalah kerusakan lingkungan. Pada materi ekosistem kelautan dan pemanasan global, aspek inilah yang menjadi fokus utama dan perlu dipikirkan oleh semua pihak. Semua kalangan internasional telah mengakui terjadinya pemanasan global dan berdampak pada lingkungan dunia secara keseluruhan, khususnya kerusakan lingkungan laut.

Aspek lainnya adalah keamanan laut itu sendiri, atau biasa disebut keamanan maritim. Dari substansi materi ini, terlihat bahwa Indonesia masih lemah dalam mengelola keamanan maritimnya. Walaupun telah ada beberapa regulasi internasional yang mengatur keamanan laut negara-negara kepulauan, Indonesia masih belum dapat mengimplementasikannya dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang salah satunya adalah pendekatan keamanan yang diprioritaskan oleh pemerintah masih berorientasi ke wilayah darat ketimbang wilayah laut. Oleh karena itu muncullah masalah-masalah keamanan pulau-pulau terluar Indonesia, *illegal fishing*, dan sebagainya.

Kemudian aspek berikutnya yang perlu dicermati adalah melihat potensi ekonomi maritim sebagai basis ekonomi Indonesia sebagai negara kepulauan. Beberapa pihak telah mengakui potensi ini dan perlu dikembangkan secara maksimal, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akan tetapi ironisnya, orientasi ekonomi pemerintah belum secara fokus mengarah pada potensi ekonomi maritim ini. Selain itu, kesejahteraan para nelayan yang merupakan bagian dari aktor penggerak ekonomi maritim masih luput dari perhatian pemerintah.

Namun sayangnya, beberapa aspek ini kerap kali luput dari perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk masyarakat. Luputnya perhatian ini terkadang disebabkan oleh faktor teknis maupun faktor kepentingan tertentu sehingga mengabaikan esensi terpenting dalam melihat wilayah kelautan Indonesia.

Rekomendasi

1. Perlunya penataan ulang regulasi pemerintah dalam mengelola bahan baku dan *logistic system, food safety & quality* yang disesuaikan dengan standar internasional, termasuk mekanisme pertanggungjawaban kelembagaan dan pemasaran sehingga dapat meningkatkan kualitas bargaining power Indonesia dalam hal pengenalan produk kelautannya
2. Pemerintah semestinya mulai mempertimbangkan untuk membangun basis ekonomi yang mengarah pada sektor-sektor yang sifatnya ekstratif, dan memulainya dengan mempertimbangkan sistem pengelolaan yang berkelanjutan dengan memelihara beberapa daerah-daerah konservasi.;
3. Dari aspek birokrasi pemerintahan, fungsi kementerian dan kelautan harus dapat difungsikan sebagai duta untuk sektor kelautan dan perikanan yang memperjuangkan kepentingan kelautan dan perikanan dalam bidang apapun; baik di level nasional maupun internasional.
4. Untuk keamanan maritim, perlu dikembangkan konsep *effective occupation* yang menempatkan seluruh batas pulau-pulau kecil yang dianggap rawan dalam menentukan batas nasional dalam satu badan otoritas khusus. Secara keseluruhan, juga harus ada *integrated maritime security policy* dalam mengelola keamanan maritim di Indonesia.
5. Perlu adanya regulasi yang jelas dari pemerintah mengenai pembangunan industri yang berbasis ekonomi maritim yang bertujuan untuk mengelola potensi kelautan Indonesia secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan.

-----oooOOOooo-----